

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang dikenal sebagai salah satu negara maju di dunia yang mengalami perkembangan yang pesat dalam sejarahnya. Perkembangan yang dialami oleh Jepang dimulai pasca berakhirnya Perang Dunia ke II dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Kemajuan ini ditandai dengan adanya peningkatan di bidang industri yang merubah Jepang dari negara agraris menjadi negara industrialis. Hal ini juga tidak terhindar dari peranan Perdana Menteri Shigeru Yoshida dimana pada tahun 1951, Perdana Menteri Shigeru Yoshida mengadopsi sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama doktrin Yoshida. Doktrin ini merupakan sebuah kebijakan yang mengutamakan perkembangan ekonomi secara menyeluruh bagi lapisan masyarakat setelah kekalahannya dalam Perang Dunia ke II. Doktrin ini juga dianggap sebagai sikap *low profile* bagi pemerintah Jepang di bidang diplomatik. Semangat doktrin tersebut akhirnya membawa negeri Sakura ini meraih masa keemasan ekonominya pada awal tahun 1980-an dan menjadikan Jepang tumbuh menjadi negara industri berbasis teknologi (Yusy, 2014).

Perkembangan industri di Jepang salah satunya ditandai dengan maraknya produk buatan Jepang yang tersebar di seluruh penjuru dunia seperti barang elektronik (Toshiba, Panasonic, Hitachi, dll) yang berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20, dalam bidang otomotif (Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi dll) yang juga mengalami perkembangan pada tahun 1950-an serta dalam bidang budaya seperti manga, anime dan dorama pada tahun 1970-an. Perkembangan yang telah dicapai oleh Jepang tersebut juga dipengaruhi oleh peranan sumber daya manusianya yang turut andil dengan menanamkan sikap disiplin yang tinggi, tepat waktu dan loyal terhadap

perusahaan Jepang. Selain itu, Pemerintah Jepang juga menerapkan nilai-nilai budaya generasi mudanya di era 50-an dan 60-an yang saat itu terpuruk karena perang melalui semboyan “bekerja adalah perang”. Adanya semboyan ini, berhasil membuat Jepang bangkit dan berusaha untuk mengatur ulang kembali perekonomiannya.

Namun, perkembangan dan kemajuan yang dialami oleh Jepang tidak sepenuhnya memberikan dampak positif. Adanya modernisasi juga membawa perubahan bagi budaya Jepang seperti hubungan keluarga yang mulai memudar, adanya sikap individualisme yang menggantikan nilai kebersamaan, kurangnya sosialisasi dan kepekaan masyarakat, kapitalisme yang melanda serta fenomena penurunan angka kelahiran. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, Jepang mengalami masalah yang berkaitan dengan kondisi demografi. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah kelahiran dan meningkatnya pertumbuhan populasi usia lanjut.

Fenomena depopulasi atau penurunan jumlah populasi sudah terjadi sejak Perang Dunia ke II, yang pada waktu itu angka kelahiran mengalami pasang surut. Pada awalnya, pemerintah Jepang menganjurkan warganya terutama perempuan untuk melahirkan banyak anak demi menyetarakan diri dengan dunia barat. Pada masa tersebut juga, pemerintah Jepang memiliki slogan “umeyo, fuyaseyo” (Mari melahirkan! Mari meningkatkan!) dengan harapan untuk meningkatkan populasi masyarakatnya dan setidaknya setiap keluarga memiliki 5 orang anak. Namun, meskipun strategi tersebut sudah dilakukan, tidak cukup untuk meningkatkan fertilitas di negeri Sakura tersebut. Kemudian, ketika para tentara dan masyarakat Jepang telah kembali dari luar negeri pasca Perang Dunia ke II, jumlah angka kelahiran meningkat dengan pesat sehingga terjadi ledakan penduduk. Pada tahun 1945 jumlah penduduk di Jepang menyentuh angka 72 juta dan pada tahun 1948 berada di angka 80 juta. Adanya fenomena ledakan penduduk ini dikenal dengan sebutan *dankai no sedai* atau *baby*

boom. Oleh karena itu, sejak adanya peristiwa tersebut, Jepang memiliki kesadaran untuk mengurangi angka kelahiran. Rentang waktu tahun 1956 dan 1964, rata-rata angka kelahiran penduduk wanita kurang dari satu. Namun, setelah tahun tersebut, angka kelahiran kembali melonjak yaitu pada tahun 1965-1974 kecuali pada tahun 1966 yang sempat mengalami penurunan. *Baby boom* di Jepang mengalami dua periode yaitu dengan periode pertama antara tahun 1947-1949 dan periode kedua pada tahun 1971-1974. Kemudian, pada tahun 1975 secara terus menerus angka kelahiran di Jepang kian menurun bahkan hingga saat ini tahun 2023 (Arianti, 2022). Pada tahun 2019, tercatat bahwa angka kelahiran mengalami penurunan sebesar 5,9% dari tahun sebelumnya. Jumlah kelahiran berada di angka 864.00 jiwa yang bahkan kurang dari 900.000 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah kelahiran bayi menurun menjadi 840.832 jiwa atau turun sebesar 2,8%. Pemerintah Jepang juga mencatat bahwa pada tahun 2021 terdapat 811.604 kelahiran atau turun sebesar 3,5% dibanding tahun sebelumnya (Bestari, 2022). Selain itu, pada tahun 2022 jumlah kelahiran bayi baru lahir berada di angka 770.747 atau turun 5%. Selanjutnya pada tahun 2023, bayi yang lahir di Jepang berjumlah 726.000 atau turun sekitar 5,8%. Angka tersebut disinyalir menjadi yang terendah sejak pencatatan dimulai pada tahun 1899 (Sekine, 2023).

Tabel 1 Data Penurunan Angka Kelahiran di Jepang

Tahun	Jumlah Angka Kelahiran	Presentase Penurunan
2019	864.000	5,9%
2020	840.832	2,8%
2021	811.604	3,5%
2022	770.747	5%
2023	726.000	5,8%
Rata-rata	802.637	4,6%

Sumber: (Bestari, 2022)

Tren penurunan ini menyebabkan adanya krisis demografi. Hal ini mengakibatkan jumlah tenaga kerja produktif tidak mencukupi sehingga warga yang berusia muda juga tidak dapat untuk membantu perkembangan ekonomi. Para ahli mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya angka kelahiran di Jepang seperti biaya hidup yang relatif mahal, terbatasnya tempat tinggal dan kurangnya perawatan anak di Jepang yang membuat warga sulit untuk membesarkan anak. Adanya persoalan-persoalan tersebut juga menjadikan banyak warga Jepang yang sudah menikah memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Selain itu, adanya gerakan feminisme memberikan pengaruh besar bagi perempuan Jepang untuk menjadi perempuan yang merdeka atas diri sendiri dan menentukan arah hidup masing-masing, serta memberikan ruang kebebasan bagi perempuan untuk berkarir dan menjadi *independent women* tanpa merasa terbebani atau membebani (Mayang, dkk, 2021).

Fenomena depopulasi dan tren *childfree* di Jepang dapat berdampak bagi beberapa aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial dan budaya di Jepang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menaikkan jumlah kelahiran. Salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah angka kelahiran di Jepang adalah dengan melibatkan perempuan sebagai aktor penting dalam hal ini. Oleh karena itu, pemerintah Jepang memerlukan penyelesaian atau strategi untuk mengatasi permasalahan demografi agar nantinya tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan negara di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

“Bagaimana strategi pemerintah Jepang dalam menangani isu depopulasi dalam kurun waktu 2019-2023?”

C. Kerangka Pemikiran

Krisis Demografi

Krisis demografi merupakan fenomena menurunnya jumlah penduduk dengan usia produktif di suatu wilayah. Menurut Kumparan.com krisis demografi dapat terjadi jika penurunan jumlah penduduk yang signifikan sehingga dapat mengganggu keseimbangan antara jumlah pekerja, kontribusi ekonomi dan sistem perawatan sosial (Rahmadanilah, 2023). Lutz, O'Neil, dan Scherbov (2003, Morgan 2003) mengatakan bahwa krisis demografi dapat diartikan sebagai suatu dinamika penurunan populasi yang mencerminkan dinamika peningkatan populasi. Waktu yang berkurang separuhnya mencerminkan waktu yang berlipat ganda dan momentum populasi dapat bernilai negatif maupun positif. Masalah-masalah sosial yang terkait dengan kesuburan rendah juga merupakan gambaran cerminan dari masalah-masalah yang terkait dengan kesuburan tinggi. Krisis demografi atau fenomena depopulasi dapat terjadi baik pada suatu negara keberadaannya dapat menjadi ancaman bagi negara tersebut (Morgan, 2003).

Pada awal Revolusi Industri, populasi global tumbuh sangat lambat, sekitar 0,04% per tahun. Kemudian, setelah tahun 1800, tingkat pertumbuhan mengalami percepatan hingga ke puncak 2,1% per tahun selama periode 1962–1968. Namun, pada tahun 2023, jumlah manusia menurun menjadi 0,9% karena runtuhnya tingkat kesuburan total di seluruh dunia. Pada tahun 1990, pertumbuhan global dalam angka absolut mengalami percepatan hingga ke puncak 92,8 juta tetapi menurun menjadi 80,0 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 melambat menjadi 64,7 juta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkiraan jangka panjang, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk di bumi akan terus menurun sebelum akhir abad ke-21 dan bahkan akan mencapai angka nol. Salah satu tren yang muncul dari adanya fenomena penurunan

populasi atau depopulasi adalah Jepang, yang populasinya saat ini (2022–2027) menurun dengan laju 0,5% per tahun. Selain Jepang, China juga mengalami hal yang sama yaitu penurunan populasi pada 2022–2027 menurun dengan laju sekitar 0,1%. Pada tahun 2050, populasi Eropa diprediksikan menurun dengan jumlah 0,3% per tahun. Pertumbuhan populasi telah menurun terutama karena penurunan mendadak dalam *total fertility rate* global, pada tahun 1963 berjumlah 5,3 dan pada tahun 2019 berjumlah 2,4 serta untuk tahun 2021 berjumlah menjadi 2,3. Penurunan angka kesuburan total atau *total fertility rate* yang terjadi di setiap negara di dunia dikenal sebagai proses transisi demografi (Union of International Associations , 2020).

Krisis demografi yang melanda dunia disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya kejadian buruk seperti wabah penyakit menular dan mematikan, kelaparan, perang, angka kelahiran yang terus menerus merosot, angka kematian yang meningkat dan emigrasi. Sejarah dari adanya krisis demografi yaitu banyak negara di Eropa dihadapkan pada penurunan populasi yang sangat besar karena adanya wabah Black Death pada abad ke-14 dan ke-17 sepertinya adanya flu yang menyerang Spanyol setelah Perang Dunia I. Selain itu, adanya kelaparan yang menyerang Irlandia pada abad ke-19, perang yang dilakukan oleh bangsa Mongol pada abad ke-13 yang menyisakan populasi di Hungaria menjadi sekitar 20%-40%, kerusuhan sipil karena adanya perang saudara di Suriah dan genosida dalam fenomena *Holocaust* (genosida terhadap Yahudi) yang memberikan pengaruh bagi menurunnya populasi penduduk. Di zaman modern, salah satunya adalah pandemi *Covid-19* yang menyebabkan adanya peningkatan angka kematian yang signifikan di sejumlah negara. Selain itu, berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Health Metrics*, Universitas Washington menyatakan bahwa terdapat perkiraan yang menunjukkan adanya penurunan yang signifikan terhadap populasi global hingga 2100 karena semakin menyusutnya angka kelahiran. Pada tahun

2100, negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Italia diprediksi akan mengalami penyusutan jumlah penduduk dengan total hampir setengahnya. Selain itu, penyusutan juga terjadi pada negara Jerman dimana menurun hampir seperempatnya. World Economic Forum juga berpendapat bahwa dampak yang menjadi akibat dari adanya angka kelahiran yang rendah yaitu meningkatnya populasi manusia usia lanjut dan berkurangnya tenaga kerja produktif (Pamungkas, 2023).

Krisis demografi yang terjadi dapat menimbulkan konsekuensi dalam jangka panjang bagi suatu negara. Adanya perubahan populasi dapat memengaruhi kekuatan dan kemajuan suatu negara dalam menjalankan kebijakan yang dipilihnya baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kasus yang ekstrim, dinamika populasi internal suatu negara bahkan dapat menggoyahkan tatanan politik dan mengancam masa depan bangsa. Adanya permasalahan ini memberikan dampak bagi semua aspek kehidupan masyarakat termasuk baik dalam perekonomian seperti penurunan jumlah PDB, penurunan kekuatan militer, penurunan inovasi karena berkurangnya generasi muda, penuaan populasi yang menjadikan ketidakseimbangan dalam struktur usia penduduk serta adanya deflasi karena didominasi oleh manusia lanjut usia. Selain itu, hal ini juga memengaruhi bidang hubungan internasional karena menciptakan tantangan yang membahayakan bagi keamanan suatu negara. Tidak hanya itu krisis demografi memunculkan permasalahan sosial yang meliputi sekolah lebih sedikit karena jumlah anak yang lebih sedikit, penurunan harga rumah karena banyaknya rumah kosong, lebih sedikit rumah baru yang dibangun dan lebih sedikit permintaan untuk akomodasi sewaan. Selain itu, penggunaan fasilitas umum menjadi berkurang karena menurunnya populasi manusia, misalnya saja fasilitas perawatan yang lebih sedikit, fasilitas olahraga yang lebih sedikit, semakin sedikit orang yang pergi ke teater, bioskop, atau konser, sehingga fasilitas ini akhirnya dikurangi.

Angkutan umum menjadi sepi peminat karena lebih sedikit orang yang bepergian dengan angkutan umum. (Government of The Netherlands, 2011).

Adanya pengaruh dalam skala besar tersebut menimbulkan permasalahan yang *urgent* bagi pemerintah dunia khususnya bagi negara yang mengalami permasalahan penurunan populasi. Oleh karena itu, fenomena krisis demografi membutuhkan strategi atau solusi untuk mengatasinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Morgan (2003) terdapat respon-respon institusional yang berbeda mengenai solusi yang untuk menghadapi krisis demografi yaitu menekankan pentingnya pelayanan penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas, menekankan perubahan gender dan teknologi yang memengaruhi pembagian kerja rumah tangga, menawarkan lingkungan kelembagaan yang sejahtera dalam kelembagaan untuk mengasuh anak. Dengan demikian, Morgan menyatakan adanya dampak natalisme atau *pro birth* yaitu sebuah ideologi yang mendukung reproduksi manusia dengan tujuan untuk meningkatkan angka kelahiran yang tinggi.

Dalam penelitian ini, Jepang sebagai salah satu negara yang mengalami krisis demografi yang disebabkan karena adanya penyusutan angka kelahiran yang signifikan memerlukan strategi sebagai upaya untuk menghadapi krisis demografi tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Jepang yaitu dengan natalisme. Kebijakan yang dilakukan oleh Jepang untuk meningkatkan angka kelahiran yaitu mendorong tingkat pernikahan bagi warganya dengan menyediakan layanan perjodohan dan memberikan imbalan bagi mereka yang menikah, membuat kebijakan layanan pengasuhan anak yang baik serta pemberian tunjangan bagi masa depan anak-anak di Jepang.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas mengenai strategi pemerintah Jepang dalam

menangani isu depopulasi tahun 2019-2023 berdasarkan konsep krisis demografi sesuai dengan solusi yang ditawarkan oleh Morgan, isu depopulasi atau krisis demografi yang dialami oleh Jepang dapat dilakukan dengan natalisme yaitu Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan terkait peningkatan laju pernikahan dengan memanfaatkan teknologi dan pemberian insentif finansial, menciptakan layanan penitipan anak yang memadai serta pemberian tunjangan masa depan sehingga dapat mendorong tingkat kelahiran.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berusaha untuk mengetahui suatu fenomena sosial yang menciptakan sebuah pandangan yang saling berhubungan untuk memperoleh suatu data dari sumber informan dan kemudian dituangkan kedalam bentuk kata-kata (Warul, 2015). Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan dengan menjelaskan topik secara detail dengan bersumber pada suatu yang mendukung seperti jurnal, buku, website resmi dan artikel lainnya yang berguna dalam penulisan tersebut. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan suatu rangkaian penelitian yang hasilnya dapat berupa data deskriptif seperti tulisan atau kata-kata dan lisan atau perilaku seseorang yang sudah dicermati (Moleong, 2018).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu berdasarkan pada studi kepustakaan atau kajian literatur. Studi kepustakaan sendiri merupakan teknik pengumpulan yang data yang menggunakan berbagai bahan literatur seperti jurnal, karya ilmiah, buku ataupun dokumen yang berguna bagi sebagai informasi pendukung. Selain itu, studi kepustakaan berguna dalam mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan untuk memperoleh landasan teori bagi masalah yang akan

diteliti. Bahan penelitian lain yang dapat menunjang sebagai sumber data dalam penelitian yaitu web-web resmi yang terkait dengan topik yang relevan (Abdi, 2017).

Dalam tulisan ini, penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan penurunan angka kelahiran di Jepang dan bagaimana strategi pemerintah Jepang dalam menangani isu depopulasi pada tahun 2019-2023.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya fenomena depopulasi di Jepang pada tahun 2019 hingga 2023.
2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya fenomena tersebut terhadap kehidupan masyarakat.
3. Mengetahui bagaimana strategi pemerintah Jepang untuk mengatasi persoalan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1: Pada Bab 1 penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teori, Hipotesis Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2: Pada Bab 2 penulis akan mendeskripsikan mengenai masalah atau isu depopulasi di Jepang dan di dunia

Bab 3: Pada Bab 3 penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana strategi pemerintah Jepang dalam menangani isu depopulasi dan fenomenan childfree.

Bab 4: Pada Bab ini berisi kesimpulan sebagai simbulan dari paparan bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya.